



KR-Antara/Fakhri Hermansyah

KLH SEGEL PAGAR LAUT: Kapal nelayan melintas di samping pagar laut di Pesisir Tarumajaya, Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (30/1/2025). Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegakkan area proyek pagar laut yang telah direklamasi karena diduga menyalahi Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PERTAMINA TEGASKAN

Tak Ada Kenaikan Harga LPG 3 Kg

JAKARTA (KR) - PT Pertamina Patra Niaga menegaskan, saat ini tidak ada kenaikan harga LPG/gas elpiji kemasan tabung 3 kilogram atau bersubsidi di pangkalan resmi perusahaan seluruh Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari di Jakarta, Kamis (30/1) mengatakan, harga LPG 3 kg bersubsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yang ditetapkan masing-masing Pemerintah Daerah.

"Saat ini, tidak ada kenaikan harga LPG 3 kg. Kami pastikan harga LPG 3 kg di pangkalan resmi mengikuti HET yang ditetapkan setiap Pemda. Jika ada harga LPG 3 kg yang mahal, kemungkinan karena masyarakat membelinya di luar pangkalan resmi atau di pengecer. Untuk itu, kami mengim-

bau masyarakat membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi karena harganya sesuai HET," tegas Heppy menepis isu adanya kenaikan harga LPG 3 kg di lapangan.

Heppy menjelaskan, pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina dapat dikenali dari papan nama atau spanduk yang menyatakan mereka adalah pangkalan resmi dan tertera harga jual sesuai HET.

Selain harga sesuai HET, tambah Heppy, keuntungan membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi adalah jaminan mutu dan kualitas, karena masyarakat dapat melakukan pen-

imbangan langsung untuk memastikan kesesuaian berat isi LPG dan juga tabung yang dikirim dari agen resmi Pertamina.

Saat ini, terdapat 259.226 pangkalan resmi Pertamina yang tersebar di seluruh Indonesia. Perluasan pangkalan dengan Program One Village One Outlet (OVOO) terus dilakukan Pertamina Patra Niaga, termasuk upaya mengajak para pengecer bergabung menjadi pangkalan resmi. "Jika masyarakat mengalami kendala mendapatkan LPG 3 kg ataupun mendapati pangkalan resmi Pertamina menjual di atas HET, dapat menghubungi call centre 135," sebut Heppy.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga memastikan tidak ada kelangkaan dalam distribusi gas

elpiji (LPG) 3 kg. "Langka sih enggak. Saya pastikan enggak. Enggak ada (kelangkaan). Tapi memang setiap rumah tangga dibatasi (pembeliannya)," ucap Bahlil.

Bahlil menjelaskan, yang saat ini sedang dilakukan Pemerintah adalah pembatasan pembelian gas LPG 3 kg. Misalkan, apabila satu rumah tangga perbulannya membutuhkan 10 tabung, namun tiba-tiba membeli 30 tabung, maka terjadi kejanggalan. "Pasti kami batasi (pembeliannya). Karena kalau beli banyak seperti itu, pasti ada maksud lain. Itu yang kami tata," ucap Bahlil.

Pembatasan pembelian LPG 3 kg tersebut, kata Menteri ESDM, bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi LPG 3 kg benar-benar tepat sasaran. (Ant/San)-f

100 PENERBANGAN DIBATALKAN

Pesawat Jet Tabrak Helikopter AD

WASHINGTON (KR) - Satu pesawat jet PSA Airlines bertabrakan dengan helikopter Sikorsky H-60 saat mendekati Bandara Nasional Reagan dekat Washington DC. Imbasnya, lebih dari 100 penerbangan di bandara di Washington dibatalkan atau ditunda menyusul insiden tabrakan yang terjadi pada Rabu (29/1) malam waktu setempat. Laporan pada portal web FlightAware.com. menyebutkan, sebanyak 62 penerbangan dibatalkan, sementara 59 penerbangan ditunda.

Presiden AS Donald Trump mengatakan, bahwa tabrakan antara pesawat terbang dan helikopter Angkatan Darat (AD) AS di dekat Bandara Nasional Reagan (DCA) dekat Washington sebenarnya dapat dicegah. "Pesawat itu berada di jalur yang rutin dan dalam keadaan sempurna untuk mendekati menuju bandara. Helikopter itu terbang lurus ke arah pesawat itu untuk waktu yang lama. Situasi

malam cukup cerah, lampu-lampu di pesawat itu menyala, mengapa helikopter itu tidak naik atau turun, atau berbelok," tulis Trump di platform media sosial Truth Social, Kamis (30/1).

"Mengapa menara pengawas tidak memberi tahu helikopter apa yang harus dilakukan alih-alih bertanya apakah mereka melihat pesawat itu. Ini adalah situasi buruk yang tampaknya seharusnya dapat dicegah. TIDAK BAIK!!!" tambah Trump.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan bahwa Angkatan Darat dan Departemen Pertahanan AS segera meluncurkan penyelidikan atas insiden tabrakan pesawat dan helikopter yang terjadi di dekat Bandara Nasional Reagan (DCA) dekat Washington itu. "Investigasi segera diluncurkan oleh Angkatan Darat dan Departemen Pertahanan," tulis Hegseth di pada laman media sosial X. (Ant/Has)-d

TUNGGU PUTUSAN RAPIM DPR

Pembahasan Revisi UU Pemilu

JAKARTA (KR) - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Politik atau revisi UU Pemilu maupun UU Pilkada masih menunggu putusan Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI.

Rifqinizamy menjelaskan, Komisi II DPR belum membahas RUU Omnibus Law Politik meskipun badan legislatif ini telah bersidang sejak 21 Januari 2025.

"Belum ada pembahasan karena belum diputuskan di Rapim DPR apakah akan diserahkan ke Komisi II? Apakah dibentuk pansus (panitia khusus) atau diserahkan kepada Baleg (Badan Legislatif)?" kata Rifqinizamy usai menghadiri acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Tanah Abang Jakarta, Kamis (30/1).

Ia juga menuturkan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden belum dibahas Komisi II DPR, karena menunggu putusan rapim tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan, badan legislatif ini bakal langsung membahas beragam hal, termasuk wacana RUU Omnibus Law Politik pada Rapim DPR RI. Namun, diskusi resmi untuk membahas RUU Omnibus Law Politik itu dilakukan dalam forum di Komisi II DPR RI. (Ant)-d

SEKOLAH SWASTA TURUT DILIBATKAN

Pemerintah Resmi Ganti PPDB Jadi SPMB

JAKARTA (KR) - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada 2025.

"Alasannya diganti kenapa? Karena memang kita ingin memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi semua," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/1).

Mendikdasmen mengatakan, perubahan sistem ini juga dilakukan dalam rangka memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pendidikan sebelumnya. Ia memaparkan, perubahan dalam sistem ini terjadi pada penerimaan siswa SMP, di mana pada jenjang ini terdapat perubahan pada persentase penerimaan siswa melalui empat jalur penerimaan, seperti Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi dan Mutasi.

Sedangkan pada SMA, lanjut Abdul Mu'ti, Sistem Penerimaan Murid Baru di-

lakukan lintas kabupaten/kota, sehingga penetapannya ada pada level provinsi. "Yang sudah baik kita pertahankan, karena itu untuk SD tidak ada perubahan," ujarnya.

Mendikdasmen menjelaskan berbagai perubahan termasuk persentase penerimaan siswa pada jenjang SMP dilakukan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan sejak awal pelaksanaan sistem PPDB, yang telah berjalan sejak 2017 silam.

Oleh karena itu, saat ini Kemendikdasmen tengah berkolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait, salah satunya Kementerian Dalam Negeri, sebab pelaksanaan SPMB ini melibatkan pemerintah daerah.

"Rancangan ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden, dan beliau mengatakan setuju dengan substansi dari usulan kami," terangnya.

Pada bagian lain, Kemendikdasmen bakal turut melibatkan sekolah swasta dalam SPMB. (Ati)-d

INSIDEN PENEMBAKAN WNI DI MALAYSIA

Presiden Yakin Diselidiki dengan Baik

JAKARTA (KR) - Presiden Prabowo Subianto yakin aparat penegak hukum Malaysia menyelidiki dengan baik kasus penembakan WNI oleh petugas dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Presiden telah membahas persoalan itu secara garis besar dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat keduanya bertemu di Kuala Lumpur, Senin (27/1).

"Kami juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik," kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (30/1).

Penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) oleh aparat Malaysia tersebut mendapat perhatian serius dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta kasus penembakan tersebut diurus tuntas. Puan juga

mendorong pemerintah melakukan mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Terkait kasus ini, kementerian terkait dan aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti, yakni menyelidiki serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan," kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).

Sebagaimana diketahui, lima WNI yang diduga sebagai PMI ilegal menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Dalam insiden tersebut, seorang WNI bernama Basri tewas, sedangkan empat lainnya mengalami luka-luka, dengan dua korban dalam kondisi kritis. Jenazah Basri telah dipulangkan ke kampung halamannya di Riau. Sementara empat korban lainnya masih menjalani perawatan di RS Serdang dan RS Klang Malaysia.

Puan meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan perlindungan terhadap PMI yang menjadi korban. "Selain itu lakukan mitigasi agar kejadian seperti ini tidak terulang," ujarnya.

Dukungan diberikan atas langkah Kementerian Luar Negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta instansi terkait lainnya yang saat ini tengah meminta transparansi dari otoritas Malaysia untuk mengusut kasus tersebut.

Puan menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal kasus ini melalui alat kelengkapan dewan (AKD) terkait. Mengenai kemungkinan pemanggilan pemerintah untuk memberikan penjelasan resmi, menyebut hal itu akan ditangani oleh komisi yang berwenang. "Komisi terkait tentu akan melaksanakan tugasnya dalam menangani persoalan ini," pungkasnya. (Ful)-d

PEMDA DIY BERI SURAT TEGURAN

Ditemukan 16 Tambang Ilegal di Kali Progo

YOGYA (KR) - Aktivitas penambangan ilegal di sepanjang aliran Kali Progo menjadi perhatian serius Pemda DIY. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIY menemukan ada 16 tambang pasir ilegal yang masih beroperasi di kawasan tersebut.

Menyikapi kondisi tersebut, Dinas PUP ESDM telah memberikan surat teguran kepada para pelaku tambang pasir ilegal yang ditembuskan ke sejumlah pihak, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH).

"Penutupan tambang ilegal ini bukan hal yang sederhana karena merupakan kewenangan APH. Untuk itu kami mencoba melakukan edukasi dengan mengirimkan surat teguran ditembuskan ke beberapa pihak salah satunya ke APH. Karena di sepanjang Kali Progo saja berdasarkan data yang kami miliki ada 16 tambang ilegal," kata Kepala Dinas PUP ESDM DIY Anna Rina Herbranti di Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (30/1).

Anna mengungkapkan, Dinas PUP ESDM DIY terus berupaya mendorong legalisasi penambangan dengan memberikan izin resmi. Namun proses tersebut memerlukan sejumlah persyaratan yang cukup ketat. Di antaranya untuk tambang di kawasan sungai, izin diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) dengan

rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO). BBWSO juga bertugas memeriksa lokasi penambangan, ketentuan tata ruang dan memastikan ketersediaan material pasir sebelum memberikan rekomendasi izin.

"Memang syaratnya banyak, tetapi kami tidak menghalangi selama sesuai aturan. Ada tata ruang yang harus dipatuhi, seperti lokasi tambang, volume yang diizinkan, serta jarak yang aman dari sarana dan prasarana. Saat ini hanya ada satu tambang legal di Kali Progo yang terletak sekitar 1.500-2.000 meter dari sisi Selatan. Sisanya merupakan tambang ilegal yang mayoritas menggunakan mesin sedot," paparnya.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau kerusakan groundsill yang ambrol di Srandakan, Bantul. Kerusakan itu diduga disebabkan oleh aktivitas penambangan pasir yang berlebihan. Pihaknya menilai penggunaan mesin sedot tambang menjadi salah satu penyebab derasnya aliran sungai dari hulu ke hilir, yang pada akhirnya merusak bangunan penahan sungai.

"Penambangan pasir yang berlebihan harus ditertibkan, terutama di hilir. Jika tidak, dampaknya akan semakin parah. Sebaliknya penambangan pasir di DIY hanya diperuntukkan bagi rakyat, bukan pengusaha besar," ungkapnya. (Ria)-f

RUU Minerba

.....

peluang bagi sektor UMKM untuk lebih berpartisipasi di dalam proses pengelolaan sumber daya alam dan implikasinya mereka menjadi berdaya. Hal ini selaras dengan substansi demokrasi ekonomi terkait dengan perlakuan yang adil dan dukungan pengembangan kepada pengusaha ekonomi lemah, terutama dalam hal akses ke sumber daya alam dan sumber dana. Selama ini kehadiran korporasi tambang seringkali justru kurang memberikan manfaat bagi masyarakat lokal bahkan seringkali dianggap memberikan dampak negatif. Hal ini misalnya dilihat dari dampak pencemaran/polusi, kesempatan peluang kerja yang minim, konflik penggunaan lahan dan sebagainya. Oleh karena itu, keberadaan sektor UMKM sebagai pengelola diharapkan mampu menjadi peluang bagi mereka untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat.

Sedangkan sebagai tantangan adalah sejauhmana kapasitas pelaku UMKM di dalam mengelola tambang terutama juga pelaku UMKM di level lokal. Tanpa ada peningkatan kapasitas yang memadai dikhawatirkan para pelaku-pelaku UMKM lokal akan kalah bersaing dengan pelaku UMKM dari luar daerah. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia pelaku UMKM juga akan menyebabkan tidak optimalnya mereka di dalam pengelolaan tambang. Pada sisi lain, ada kekhawatiran

bahwa sektor UMKM ini hanya akan menjadi alat/nama bagi sektor-sektor usaha lain yang lebih besar. Dalam bidang yang lain, kasus-kasus semacam ini sering terjadi. Namanya menggunakan UMKM akan tetapi ternyata pemainnya adalah aktor-aktor pemilik modal.

Berdasarkan hal tersebut, tampaknya ada banyak hal yang harus disiapkan jika sektor UMKM diberikan ruang untuk mengelola tambang. Pertama, aspek kapasitas, kelembagaan dan legalitas pelaku UMKM. Dari aspek kapasitas perlu ada pelatihan-pelatihan pengembangan tentang bagaimana pengelolaan tambang yang modern dan berorientasi pada kelestarian lingkungan. Dari aspek kelembagaan, kelompok-kelompok UMKM yang ada di kawasan tersebut dapat dilembagakan baik dalam bentuk koperasi, Badan Usaha Milik Desa, Paguyuban atau mungkin dalam bentuk CV/PT dan sebagainya. Bentuk kelembagaan ini tentunya memperhatikan aspek potensi dan sosio-kultural masyarakat di lokasi pertambangan. Dari berbagai pilihan lembaga tersebut memang akan sangat baik jika lembaga yang ada memperhatikan lembaga-lembaga yang berbasis komunitas seperti koperasi, BUMDes, paguyuban. Model-model kelembagaan ini tentunya akan mendorong spirit inklusivitas dan proses pemberdayaan terhadap masyarakat akan lebih kuat sehingga ha-

Sambungan hal 1

rapan bahwa keikutsertaan UMKM di dalam pengelolaan tambang tentunya akan berdampak lebih luas bagi masyarakat. Proses pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah untuk legalitas lembaga-lembaga tersebut juga perlu dilakukan sehingga pelaku UMKM akan memiliki kesiapan jika memperoleh IUP (Ijin Usaha Pertambangan). Kedua, perlunya prioritas dan afirmasi khusus bagi sektor-sektor UMKM lokal yang akan memperoleh ijin usaha pertambangan. Hal ini menjadi aspek penting karena pelaku lokal lah yang lebih memahami kondisi riil pertambangan termasuk kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Dengan dikelola oleh UMKM lokal, diharapkan juga akan dapat terwujud bagaimana pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

Berbagai strategi tersebut diharapkan akan membuat sektor UMKM memiliki kapasitas dan kemampuan adaptif serta inovatif di dalam pengelolaan tambang. Partisipasi mereka di dalam proses pengelolaan tambang diharapkan tidak sekadar menunjukkan peranan sektor UMKM dalam struktur perekonomian, akan tetapi juga kontrol warga masyarakat di dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi. □ -f

(Penulis adalah Dosen Departemen Pembanguan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM)